



# Accountability Brief

**Pengarah:**  
Inosentius Samsul  
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)

**Tim Penulis:**  
Djustiawan Widjaya  
Eko Adityo Ananto  
Alfi Mufida Ahmad  
Widi Septuaji

## Tantangan Pemerintah dalam Memenuhi Kebutuhan Tenaga Pustakawan

### Isu Strategis

Dewasa ini, profesi pustakawan cenderung masih belum diapresiasi oleh sebagian masyarakat awam (Sudarsono, 2010). Padahal sejatinya pustakawan mempunyai peran penting dalam mencerdaskan masyarakat melalui program pembudayaan literasi dalam bentuk sosialisasi pengembangan minat baca dan tulis masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Bahwa pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperolehnya melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Dalam hal literatur, pustakawan harus bisa mencari, menghimpun, mengelola, menyajikan dan menyebarluaskan informasi yang terdapat di perpustakaan agar sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan oleh pengguna baik pada perpustakaan umum, perpustakaan perguruan tinggi maupun pada perpustakaan lainnya (Tunardi, 2018).

### Permasalahan

Sehubungan dengan tujuan mencerdaskan masyarakat tersebut, terdapat kendala kurangnya kuantitas pustakawan atau tenaga perpustakaan di Indonesia. Berdasarkan data dari Perpustakaan Nasional dalam Renstra 2020-2024 ketersediaan tenaga perpustakaan di Indonesia masih sangat kurang. Sampai dengan tahun 2022 jumlah tenaga perpustakaan di Indonesia hanya 4.467 orang. Menurut standar *International Federation of Library and Association (IFLA)*, rasio ketercukupan tenaga perpustakaan umum adalah 1:2500, artinya maksimal 1 orang tenaga perpustakaan melayani 2.500 orang penduduk. Dirjend Dukcapil mencatat kependudukan semester II tahun 2021 pada tanggal 30 Desember 2021 jumlah penduduk Indonesia mencapai 273.879.750 jiwa. Artinya secara nasional dibutuhkan tenaga pustakawan sejumlah 105.085 orang. Sehingga terdapat gap atau kekurangan tenaga pustakawan sekitar 100.618 pustakawan atau mencapai kurang lebih 95,75 persen. Adapun persebaran tenaga pustakawan di seluruh Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

2022

Komisi X

Tabel Sebaran Tenaga Perpustakaan di Indonesia  
Juni 2022

No	Provinsi	Jumlah Tenaga Perpustakaan						Jumlah
		PS	PT	PK	PP	PN	PU	
1	PemProv. Aceh	18	63	9	42	0	51	183
2	PemProv. Bali	17	48	20	14	0	21	120
3	PemProv. Bangka Belitung	0	6	2	19	0	22	49
4	PemProv. Banten	1	32	3	13	0	27	76
5	PemProv. Bengkulu	3	31	4	20	0	7	65
6	PemProv. DI. Yogyakarta	5	141	14	14	0	46	220
7	PemProv. DKI Jakarta	0	26	184	17	535	0	762
8	PemProv. Gorontalo	0	12	0	11	0	8	31
9	PemProv. Jambi	4	20	2	25	0	4	55
10	PemProv. Jabar	3	245	100	35	0	59	442
11	PemProv. Jateng	34	174	16	39	0	99	362
12	PemProv. Jatim	5	168	10	38	0	62	283
13	PemProv. KalBar	1	21	4	25	0	23	74
14	PemProv. KalSel	7	48	17	17	0	14	103
15	PemProv. KalTeng	1	10	0	19	0	10	40
16	PemProv. KalTim	3	34	4	27	0	24	92
17	PemProv. KalUt	0	0	1	1	0	6	8
18	PemProv. Kep. Riau	0	2	2	15	0	10	29
19	PemProv. Lampung	17	31	2	11	0	26	87
20	PemProv. Maluku	0	6	2	22	0	0	30
21	PemProv. Maluku Utara	0	4	0	0	0	1	5
22	PemProv. NTB	5	37	15	23	0	26	106
23	PemProv. NTT	0	13	6	18	0	5	42
24	PemProv. Papua	0	11	3	30	0	1	45
25	PemProv. Papua Barat	0	3	0	0	0	0	3
26	PemProv. Riau	7	46	2	49	0	16	120
27	PemProv. SulBar	3	1	1	2	0	0	7
28	PemProv. SulSel	49	121	43	91	0	125	429
29	PemProv. SulTeng	1	39	2	25	0	1	68
30	PemProv. SulTenggara	13	18	5	32	0	10	78
31	PemProv. SulUt	0	55	1	25	0	3	84
32	PemProv. SumBar	9	89	4	23	0	23	148
33	PemProv. SumSel	6	31	13	29	0	35	114
34	PemProv. SumUt	2	43	5	42	0	15	107
		<b>214</b>	<b>1629</b>	<b>496</b>	<b>813</b>	<b>535</b>	<b>780</b>	<b>4467</b>

Sumber: Perpunas (2022)

**Keterangan**

PS = Perpustakaan Sekolah

PK = Perpustakaan Khusus

PN = Perpustakaan Nasional RI

PT = Perpustakaan Perguruan Tinggi

PP = Perpustakaan Umum Provinsi

PU = Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota

2022

Komisi X

Pustakawan di Indonesia cenderung tidak tersebar secara merata dan berdasarkan uraian pada tabel di atas sekitar 46% masih terpusat di pulau Jawa. Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah untuk memenuhi kuantitas pustakawan yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat dari wilayah barat hingga timur Indonesia.

Perpustakaan Nasional dalam Renstra pusat pembinaan pustakawan tahun 2020-2024 mengidentifikasi kendala-kendala yang menyebabkan kurangnya ketersediaan tenaga perpustakaan di Indonesia sebagai berikut:

1. Kendala Lingkungan Internal:
  - a. Sumber daya manusia yang tidak *link and match* antara pendidikan dan pengalaman dengan *task skill* bidang kepustakawanan masih banyak.
  - b. Tenaga perpustakaan banyak yang belum memenuhi kriteria standar persyaratan.
2. Kendala Lingkungan External
  - a. Pembangunan perpustakaan di Indonesia tidak merata, Di Indonesia Jumlah perpustakaan terkonsentrasi di pulau Jawa (47,89%) Sumatera (23,55%) Sulawesi (11,62%) Kalimantan (6,77%) Bali dan Nusa Tenggara (8,57%) Papua (0,48%) dan Maluku (1,77%)
  - b. Kurang memadainya kesejahteraan pustakawan.
  - c. Banyak orang yang memandang sebelah mata pustakawan karena tidak mengetahui fungsi dan tugas pustakawan.
  - d. Tidak selarasnya penerapan aturan antara pemerintah pusat dan daerah terkait pengembangan karir pustakawan. Hal ini banyak ditemukan di daerah dimana unit kerja kepegawaian di daerah menetapkan prosedur yang menyulitkan karir pustakawan.

Pemerataan pustakawan perlu menjadi fokus Perpustakaan Nasional dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat dari wilayah barat hingga ke timur Indonesia. Untuk itulah diperlukan kebijakan distribusi antar pustakawan terutama dari daerah yang surplus kepada yang masih kekurangan dalam rangka menciptakan *transfer of knowledge*. Terdapat penelitian sebelumnya dari Maulana (2017) yang memperkuat kebijakan tersebut melalui program pertukaran pustakawan yang disebut **saling silang pustakawan** dimana pustakawan di Perpustakaan Umum Kabupaten terluar dan/atau Provinsi tempat kabupaten/ kota terluar bertukar tempat dengan pustakawan Perpustakaan Perguruan Tinggi serta pustakawan Perpustakaan Nasional.

### Rekomendasi

Komisi X DPR RI perlu mendorong Perpustakaan Nasional agar dapat menyelesaikan upaya pemerataan atas penyediaan tenaga pustakawan kedepannya. Untuk itu Perpustakaan Nasional perlu mengkaji kebijakan pertukaran antar pustakawan dalam rangka memenuhi pemerataan pustakawan. Untuk itu Perpustakaan Nasional perlu mempersiapkan langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pemetaan kebutuhan pustakawan khususnya di daerah yang masih kekurangan dan mempersiapkan SDM pustakawan yang *eligible* dan layak mengikuti program ini;
2. Mempersiapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program yang meliputi status kepegawaian selama mengikuti program serta skema pembiayaan (kompensasi) dengan berkoordinasi kepada pemerintah daerah;
3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada pustakawan dari daerah terluar agar terjadi *transfer of knowledge*.

Selain itu pemerintah juga perlu memperhatikan pemerataan pembangunan perpustakaan agar tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa saja mengingat perpustakaan pada dasarnya tempat aktualisasi bagi pustakawan dan juga perlu memperbaiki rekrutmen pustakawan baik yang bersumber dari CPNS maupun *in passing* dengan segenap regulasi yang ada di dalamnya termasuk kesejahteraan, jenjang karir, dan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan zaman.

## Referensi

- Indonesia. 2007. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4774. Kementerian Sekretariat Negara: Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri RI. 2022. 273 Juta Penduduk Indonesia Terupdate Versi Kemendagri. Diakses dalam <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-versi-kemendagri> pada 15 Juni 2022.
- Maulana, Khosyin Alfin. 2017. Saling Silang Pustakawan: Sebuah Usulan Program. Media Pustakawan Vol. 24 No.4 Tahun 2017. Perpustakaan RI: Jakarta.
- Perpusnas RI. 2020. Rencana Strategis Perpustakaan Nasional RI 2020-2024. Perpustakaan RI: Jakarta
- Pusat Pembinaan Pustakawan Perpustakaan Nasional RI ([perpusnas.go.id](http://perpusnas.go.id))
- Sudarsono, Blasius. 2010. Pengembangan Profesi Pustakawan?. Media Pustakawan Vol 17 No 3 & 4 Tahun 2010. Perpustakaan RI: Jakarta.
- Tunardi. 2018. Memaknai Peran Perpustakaan dan Pustakawan dalam Menumbuhkembangkan Budaya Literasi. Media Pustakawan Vol. 25 No.3 Tahun 2018. Perpustakaan RI: Jakarta.